

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR “PENTING BAGI NEGARA” DAN “HAJAT HIDUP ORANG BANYAK” SEBAGAI PENGECEUALIAN ATAS LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI NEGARA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

oleh

Alvin Mufti Nusandi¹ dan Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.²

INTISARI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara implisit memberikan pengecualian atas penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terjadi inkonsistensi sehingga salah satunya memicu gejolak akan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengertian dan batasan makna “penting bagi negara” dan “hajatan hidup orang banyak”, mengetahui penyebab adanya inkonsistensi dan menentukan kebijakan yang seharusnya diambil dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang berhubungan dengan barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan hal-hal apa saja yang tergolong “penting bagi negara” dan “hajatan hidup orang banyak” harus mendapatkan referensi dari peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan serta melakukan studi lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat. Adapun penyebab adanya inkonsistensi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang berhubungan dengan barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara berasal dari tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan tidak setaranya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kurang optimalnya badan/lembaga yang dibentuk/ditunjuk sebagai penyelenggara, dan hadirnya era persaingan yang semakin terbuka dan arus globalisasi yang semakin masif. Oleh karenanya, peninjauan dan evaluasi harus dilakukan terhadap peraturan, kebijakan, maupun badan/lembaga yang dibentuk/ditunjuk sebagai penyelenggara.

Kata Kunci: Penting bagi negara, Hajatan hidup orang banyak, Monopoli, Persaingan usaha

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**JURIDICAL ANALYSIS OF “IMPORTANT TO THE COUNTRY” AND
“LIFELONG NEEDS OF THE PEOPLE” ELEMENTS AS EXCEPTIONS
TO THE PROHIBITION OF STATE MONOPOLY PRACTICES IN
INDONESIA’S BUSINESS COMPETITION LAW**

by

Alvin Mufti Nusandi¹ dan Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.²

ABSTRACT

Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition implicitly provides exceptions to the operation of monopolies and/or concentration of activities related to the production and/or marketing of goods/services that affect the lifelong needs of the people and production sectors that important for the stata. In its implementation, there are inconsistencies in the operation so that it triggers turmoil in fulfillment of the needs of the society.

This study aims to gain an understanding of the meaning and definition of "important to the state" and "lifelong needs of the people", to find out the causes of inconsistencies and determine the policies that should be taken in the implementation of business activities related to goods/services that affect the lifelong needs of the people and production sectors that important for the state related to the public interest. This research is a juridical-normative research with secondary data sources.

The results of the study indicate that in determining what things are classified as "important to the state" and “lifelong needs of the people" must obtain references from various other relevant laws and regulations, such as laws and regulations of industry, trade, and also conducting field studies to find out the phenomena that occur in the society. The causes of inconsistencies in the implementation of business activities related to goods/services that affect the lifelong needs of the people and production sectors that are important for the state come from disharmony in the laws and regulations made and unbalanced policies issued by the government, less than optimal implementation by the agency/institution that was formed/appointed as the organizer, and the presence of an era of increasingly open competition and an increasingly massive flow of globalization. Therefore, review and evaluation must be carried out on regulations, policies, and agencies/institutions that are formed/appointed as organizers.

Keyword: Important to the state, Lifelong needs of the people, Monopoly, Business Competition

¹ Master of Law Student at Gadjah Mada University.

² Professor at Faculty of Law, Gadjah Mada University.